



Satpol PP Menjaga Wibawa

UMBULHARJO, BERNAS -- Penjabat (PJ) Walikota Yogyakarta, Sulisty, mengingatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus bisa menjaga wibawa serta tidak melibatkan diri dalam kepentingan pihak tertentu.

"Jangan sampai aparat penegak Perda, penjaga ketertiban dan ketenteraman ini, hilang wibawanya karena terlibat kepentingan pihak-pihak tertentu. Jika wibawa itu hilangnya menjatuhkan nama Pemerintah Kota Yogyakarta," ujarnya, Senin (3/4) di Balai Kota Yogyakarta, pada acara Konsolidasi dan Pembinaan Mental Pegawai dan Mitra Kerja Pamong Praja.

Menurut dia, setiap tindakan mengawal Perda harus memperhatikan urusan hak asasi manusia.

"Memang dunia sudah berubah. Zaman sekarang *mainstreamnya* zaman hak asasi manusia. Ini harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, dalam melakukan sesuatu hal tentu kita tidak boleh melanggar aturan yang sudah kita sepakati bersama. Ketugasan kita tetap menjaga ketertiban dan pengamanan tetapi harus memperhatikan koridor hukum kekinian," tambah Sulisty.

Dia memberi dukungan moral kepada anggota Satpol PP untuk berani menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak perlu takut dan ragu-ragu menjalankan tugas mengawal Perda.

"Kalau ada sesuatu, *panjenengan* tidak usah ragu-ragu, karena di belakang *panjenengan* ada kita semua, ada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Panjenengan* adalah bagian dari kita. Tidak perlu takut. Kalau itu memang harus ditertibkan atau diamankan, lakukan sesuai dengan ketugasan Bapak Ibu sekalian," pesan dia.

Anggota Satpol PP dan mitra harus berpegang pada prosedur yang ditetapkan dan selalu melakukan komunikasi dengan pemangku kebijakan di atasnya.

"Jangan sampai kita meninggalkan komunikasi. Prinsip bekerja adalah tidak boleh melakukan pembiaran, tetapi cepat harus diatasi dengan mencari solusi terbaik. Ada dua hal yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, cepat lakukan penyelesaian. Penyelesaiannya mungkin bisa di kita (Pemkot) atau di Kepolisian, atau Forkompinda," tambahnya.

Anggota Satpol PP juga perlu memahami produk hukum seperti Perda dan Perwali yang diterbitkan Kota Yogyakarta. Selain itu, juga Perda DIY, Pergub maupun aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ini dimaksudkan agar anggota Pol PP dan mitra kerja tepat melakukan penegakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Apabila penegakan Perda sesuai dengan aturan maka tercipta keamanan dan kenyamanan di wilayah Kota Yogyakarta. Dengan demikian akan terwujud masyarakat yang aman, nyaman dan sejahtera.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Suhud selaku Ketua Paksi Katon Yogyakarta pihaknya siap memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk ikut menjaga ketertiban dan keamanan sesuai kewenangan dan porsi yang diberikan kepada mereka. (*)

Instansi
Satpol PP

WWW.
<http://cetak.harianbernas.com/28186>



MITRA KERJA -- Penjabat Walikota Yogyakarta Sulistyono menyerahkan tumpeng diterima Ketua Paksikaton, Muhammad Suhud di sela-sela acara konsolidasi, Senin (3/4) di Balikota Yogyakarta. Acara itu sekaligus untuk memperingati HUT Satpol PP.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005